

ABSTRAK

Mayoritas masyarakat Pamekasan menganut ajaran agama islam. Maka dari itu nilai-nilai islam dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat disana. Namun, dengan kentalnya ajaran islam tersebut justru menimbulkan permasalahan yakni penolakan pengembangan terhadap pariwisata yang ada disana dengan alasan pariwisata cenderung dengan hal maksiat. Khususnya di Desa Bunder Pademawu Pamekasan juga terdapat permasalahan mengenai pariwisata yaitu tidak adanya *legitimasi* mengenai pengelolaan pariwisata yang menjadi penghambat dalam pengembangannya.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kentalnya budaya islam yang ada di Pamekasan, pengembangan pariwisata dengan konsep wisata syariah menjadi solusi dalam pengembangan pariwisata yang ada disana. Dan juga dengan adanya kewenangan besar yang diberikanya oleh pemerintah kepada pemerintah desa, dapat menjadi dasar dibentuknya produk hukum di tingkat desa. Dengan Kewenangan tersebut maka sudah seharusnya pemerintahan desa Bunder Pademawu Pamekasan membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh desa tersebut dan disesuaikan dengan kultur budaya setempat yaitu berbasis islami.

Kata Kunci : Kewenangan desa dalam merumuskan rancangan peraturan di desa, Peraturan Desa, Wisata Syariah

ABSTRACT

The majority of Pamekasan's people adhere to Islamic's teachings, so Islamic values are used as guidelines for the people there. However, the thick Islamic's teachings actually causes many problems. That is the rejection of the development of tourism with the reason is tourism tends to be immoral. Especially in the village of Bunder Pademawu Pamekasan, the problems of the tourism is absence of legitimacy regarding to tourism management which is an obstacle in its development.

This research method uses normative research methods. The approach used statute approach. The results of this study indicate that the thick culture of Islam in Pamekasan, tourism development with the concept of tourism sharia is a solution in the development of tourism in Pamekasan. And also the great authority granted by the government to the village government can be the basis for the formation of legal products at the village level. With this authority, the Bunder village government should make the laws and regulations that the village needs and adapt it to the local village culture based on Islam.

Keywords: Village authority in formulating draft regulations in the village, Village Regulations, Sharia Tourism

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis	7
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN DESA UNTUK PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENGENAI WISATA SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEARIFAN LOKAL DAERAH DENGAN TEORI TERKAIT.....	15
2. 1 Kewenangan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa	15

2. 2	Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia.....	17
2. 3	Konsep Wisata Syariah.	24
2. 4	Pengakuan Kearifan Lokal di Indonesia.	26
2. 5	Teori Kepastian Hukum.....	29
2. 6	Teori Kewenangan.....	30
2. 7	Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	36
BAB III PENGATURAN TERKAIT PEMBENTUKAN PERATURAN DESA		39
3. 1	Dasar-Dasar Pembentukan Peraturan Desa.....	39
3.1.1	Dasar Normatif Pembentukan Peraturan Desa Bunder Pademawu Pamekasan Madura Terkait Pariwisata Syariah.	39
3.1.2	Dasar Sosiologis Pembentukan Peraturan Desa Bunder Pademawu Pamekasan Madura Terkait Pariwisata Syariah.	52
3. 2	Kebutuhan hukum pembentukan peraturan desa bunder pademawu pamekasan madura terkait pariwisata syariah sebagai upaya menjaga kearifan lokal daerah.....	56
BAB IV PENUTUP		62
4.1.	KESIMPULAN	62
4.2.	SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		70

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keaslian Penelitian dan Korelasinya.....	8
---------	--	---